

DAFTAR BACAAN

**Buku :**

- Ali, Achmad. 1996. *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Djumadi. 1995. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djumialdji. 2005. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwijowiyoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Fomulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Judianto, Hartono. 1992. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Wahab, solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Widodo, Joko. 2017. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarsi, Sri dan Wilda Prihatiningsih. 2019. *Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yasar, Iftida. 2011. *Menjadi Karyawan Outsourcing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

**Daftar Peraturan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang *Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*.

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang *Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat*.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah*.

**Jurnal :**

Fattah, Muzdalifah. *Implikasi Hukum Atas Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara*. E-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016.

**Internet :**

Dhakiri, M. Hanif. 2016. *Sambutan Pembukaan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Pada Sustainable Development Goals (SDGs) Conference "Indonesia's Agenda for SDGs toward Decent Work for All"*. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms\\_452680.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_452680.pdf) diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 18.59 WIB.

<https://www.edunews.id/news/di-daerah-jumlah-tenaga-kontrak-lebih-banyak-dibanding-pns> diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 21.42 WIB

<https://helpdesk.wikiapbn.org/artikel/pembayaran-honortenaga-kontrak-daerahptt-dari-apbd/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 21.49 WIB.

Syafuan Rozi. *PPPK: Solusi Yang Masih Perlu Diuji*. <http://lipi.go.id/publikasi/pppksolusi-yang-masih-perlu-diuji/28333> diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 10.47 WIB.

Rasidan. *Ratusan Tenaga Kontrak di Pemkab Gayo Lues Dirumahkan, Jumlahnya tidak Terdaftar BKPSDM*. <http://aceh.tribunnews.com/2019/01/08ratusan->

tenaga-kontrak-di-pemkab-gayo-lues-dirumahkan-jumlahnya-tidak-terdaftar-bkpsdm. diakses pada tanggal 8 Januari pukul 16.12 WIB.

Ridlowi. *Banyak Pegawai Tetapi Sedikit Pegawai, Salah Satu Tantangan Manajemen PNS*. <http://kanreg1bkn.id/bknone/artikel-13-banyak-pegawai-tetapi-sedikit-pegawai-salah-satu-tantangan-manajemen-pns.html> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 15.20 WIB.

Ritonga, Razali. *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_346599.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_346599.pdf) diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 18.46 WIB.

<http://pemerintah.net/kebijakan-moratorium-cpns/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 11.06 WIB.

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlah-penduduk-kota-surabaya> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 08.24 WIB.

[http://dishub.surabaya.go.id/dishub\\_ppb/](http://dishub.surabaya.go.id/dishub_ppb/)

#### **Buku Kuliah Non Cetak :**

Wiratraman, R. Herlambang P. *Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi, dan Tantangannya. Disampaikan pada FGD: Masa Depan Kajian Sosio-Legal dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendekia, 14 Mei 2013.*

M. Hadi Shubhan sebagai bahan kuliah pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sosio-legal pada kelas Magister Sains Hukum dan Pembangunan, di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 12 April 2017.